

# LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

## TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ( 8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BIMA  
 NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	1.	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	- PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Anggaran Rp. 260.550.000 Realisasi Rp. 240.889.000	1 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq.Kementrian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada 10 SOP,yaitu 1. Pemungutan Retribusi Parkir Khusus 2. Penarikan Retribusi Pakir Tepi Jalan Umum 3. Penarikan Retribusi Terminal SOP Layanan Ijin Insidentil 4. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor 5. Penyelenggara Angkutan Orang ( PelaksanaanIzin Trayek Angkutan Perkotaan/Pedesaan) 6. Penyelenggaraan Angkutan Penumpang ( Penerbitan Kartu Pengawasan) 7. Penyelenggaraan Angkutan Penumpang ( Penerbitan Izin	<b>10 SOP</b>	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						Insidentil) 8. Izin Dispensasi Penggunaan/Penutupan Fasilitas Jalan (Pemanfaatan Jalan Daerah) 9. Penyelenggaraan Angkutan Barang (Izin Usaha Angutan/ Izin Operasional Bongkar Muat Barang) 10. Penyelenggaraan Angkutan Barang (Penertiban Kartu Pengawasan)		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	<b>Ada</b> atau tidak ada	<b>Ada</b>	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% <b>= 14/14 x 100%</b> <b>= 100 %</b>	- Jabatan yang ada sebanyak <b>14 Jabatan</b>	<b>100%</b>	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada Jabatan Fungsional : • Tenaga penguji kendaraan bermotor <b>3 orang</b>	<b>Ada</b>	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota Bima	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap Total PNS Kota Bima <b>= 30/3.800 x 100 %</b> <b>= 0,78%</b>	- PNS SKPD, sebanyak <b>30</b> - Total PNS Kota Bima, sebanyak <b>3.800</b>	<b>0,78%</b>	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100% <b>= 7/14 x 100%</b> <b>= 100 %</b>	- Pejabat yang memenuhi syarat Diklat PIM <b>7 orang</b> - Pejabat yang ada <b>14 orang</b>	<b>50%</b>	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100% <b>= 14/14 x 100%</b> <b>= 100 %</b>	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan <b>14 orang</b> - Jabatan yang ada <b>14 orang</b>	<b>100%</b>	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya <b>Ada</b>	Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 dokumen - Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA/DPA/DPPA SKPD	<b>3 Dokumen</b>	
		Sinkronisasi Program RENJA perangkat daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak <b>10 program</b>	<b>0%</b>	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah program RENJA RKPD yang belum diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100% <b>= 4/4 x 100%</b>	Program Dalam RKA SKPD sebanyak <b>10 program</b>	<b>100%</b>	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					= 100 %			
		Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	12	Jumlah program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100% = <b>10/10 x 100%</b> = <b>100%</b>	- Program RKA RKPD yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak <b>10 program</b> - Program Dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak <b>10 program</b>	<b>100%</b>	
6	LAPORAN KEUANGAN SKPD	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100% <b>4.417.048.008,00 / - x 100%</b> = %	- Total Anggaran SKPD, Rp. <b>4.417.048.008,00</b> - Total Belanja APBD Rp. -		
		Realisasi Belana Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100% = <b>446.327.038,00 / 3.467.866.000,00 x 100%</b> = <b>12,87%</b>	- Realisasi Belanja Modal SKPD Rp. <b>446.327.038,00</b> - Total Belanja SKPD Rp <b>3.467.866.000,00</b>	<b>12,87</b>	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100% = <b>3.467.866.000,00 / 5.691.204.827,71 x 100%</b> = <b>0,86%</b>	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp 3.467.866.000,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. <b>5.691.204.827,71</b>	<b>60,93%</b>	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100% = $2.223.338.827,71 / 5.691.204.827,71 \times 100\%$ = <b>39,24%</b>	- Total realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD Rp. <b>26.900.000,00</b> - Total realisasi belanja SKPD Rp. <b>5.658.496.389,00</b>	<b>39,24%</b>	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Jumlah Komponen Laporan Keuangan - Neraca - LRA - CALK	<b>3 Laporan ada</b>	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Inventarisasi barang atau asset : - KIP A, B, C, D, E - Kartu Inventaris Barang - Kartu Inventaris Ruangan	<b>Ada</b>	
		Penggunaan asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100% = $0 / 21.717.867.367,85 \times 100\%$ = <b>0,0%</b>	- Jumlah asset yang tidak digunakan senilai <b>Rp. 0</b> - Total asset yang dikuasai senilai <b>Rp. 21.717.867.367,85</b>	<b>0%</b>	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Media Massa	Jumlah fasilitas/ prasarana partisipasi	fasilitas/ prasarana partisipasi, meliputi : a. papan pengumuman 1 buah b. kotak pengaduan 1 buah c. mobil operasional 4 unit d. Bus 5 buah e. Kotak kepuasan public f. Struktur Organisasi 1	<b>6 jenis Ada</b>	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Ada hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	<b>Ada</b>	

**Raba-Bima, 31 Desember 2020**  
**Kepala Dinas,**

**IR. H. ZULKIFLI, M.AP**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**Nip. 19611020 199203 1 004**

**LAMPIRAN II.3: FORMAT IKK UNTUK KOTA**

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

**KOTA : BIMA**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
15	Perhubungan	101	Rasio konektivitas Kota	<p>Rasio konektivitas kabupaten atau kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)</li> <li>o IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyebrangan)= jumlah lintas Penyebrangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada kabupatn/kota tersebut)</li> </ul> <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</li> <li>- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi</li> </ul>	<p>Rasio konektivitas kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan)</p> <p>Diketahui :</p> <p>IK1 = (3 x 1) / 4 = 0.75 Bobot Angkutan Jalan = 50</p> <p>IK2 = (9 x 0,5) / 11 = 0.41</p> <p>Bobot Angkutan sungai, danau dan penyebrangan = 50</p> <p>Jadi Rasio konektivitas kota = (0.75 x 50) + (0.41 x 50) = 37.5 + 20.5 = 58</p>	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyebrangan baik lintas penyebrangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>Bobot Angkutan Jalan atau sungai, Danau dan Penyebrangan :</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyebrangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot = 1</li> <li>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</li> <li>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;dalam seminggu), Bobot = 0.5</li> </ul>		
		102	Kinerja lalulintas Kota	V / C Ratio di Jalan Kota		